

Judul : Pemerintah Kudu Tegas, Kebijakan Kehutanan Jangan Direcoki Asing
Tanggal : Sabtu, 17 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pemerintah Kudu Tegas Kebijakan Kehutanan Jangan Direcoki Asing

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebagyo berharap, kebijakan kehutanan Indonesia tidak diintervensi lembaga-lembaga asing.

Soalnya, produk alam Indonesia terus dihambat oleh kampanye negatif dari beberapa lembaga Non Government Organisation (NGO). Sikap tegas harus ditunjukkan pemerintah kepada lembaga asing yang mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

"Harus dipahami, banyak LSM mengintervensi pembangunan dan sumber daya alam negara berkembang. Kedaulatan bangsa ini tidak boleh diganggu oleh kepentingan di dalam dan luar negeri," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Firman pun meminta pemerintah berani bertindak tegas terhadap kampanye-kampanye yang mengganggu kepentingan nasional. Sebagai contoh, LSM dari Amerika Serikat, Mighty Earth, yang sering membuat kampanye negatif terhadap industri sumber daya alam Indonesia. Tetapi, belum ada tindakan tegas dari pemerintah.

"Indonesia harus dapat mencontoh pemerintah India dan Brazil yang bertindak tegas kepada LSM asing di negaranya," tegas politisi senior Partai Golkar ini.

Firman menuturkan, pemerintah Brasil hingga kini tidak pernah memberikan pengakuan bagi LSM Asing seperti Greenpeace di negaranya. Harusnya hal ini bisa diikuti Indonesia. "LSM yang beroperasi di Indonesia kalau mengganggu kepentingan nasional, seharusnya dilarang dan tidak boleh melakukan kegiatan di Indonesia," tegasnya.

Firman juga mendesak adanya akuntabilitas dan

transparansi dari NGO yang beroperasi di Indonesia. Menurutnya, NGO ini harus bisa mempertanggungjawabkan sikap, tindakan, keputusan lembaga mereka kepada publik, termasuk dalam soal pendanaan. "Karena biasanya mereka menerima dana atau donasi dari luar dengan agenda tertentu," ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum & Kebijakan Kehutanan Sadino mengatakan, isu pembangunan sangatlah seksi bagi kampanye LSM. Kampanye LSM menentang pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia. Padahal tanpa aktivitas ekonomi, tidak akan mungkin bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

"Itu sama saja membiarkan masyarakat setempat tidak bisa berkembang dan semakin tertinggal," ujarnya.

Pengamat Kehutanan Petrus Gunarso menambahkan, sejatinya dalam hal sertifikasi kayu, sudah ada Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang berwenang untuk itu. Baik FSC ataupun PEFC dibentuk untuk memenuhi tuntutan pembeli di luar negeri. Masing-masing membuat standar dan skema sertifikasi yang berbeda-beda.

Di dalam negeri, juga ada sertifikasi serupa seperti Lembaga Ekolabel Indonesia dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Di pasar internasional, perusahaan kayu dari negara berkembang seperti Indonesia diminta memenuhi standar negara pembeli seperti Eropa. Itu sebabnya, berdiri lembaga seperti FSC yang menerbitkan logo dagang produk kayu. ■ KAL